



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 386.379.840.175,00
b. Belanja	<u>Rp. 354.170.858.585,00</u>

Surplus / defisit

Rp. 32.208.981.590,00

c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 32.642.420.241,00	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 64.851.401.831,00</u>	
Surplus / defisit		Rp. (32.208.981.590,00)

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (1.761.270.826,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 388.141.111.001,00
b. Realisasi	<u>Rp. 386.379.840.175,00</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. (1.761.270.826,00)

- (2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (8.540.056.581,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 362.710.915.166,00
b. Realisasi	<u>Rp. 354.170.858.585,00</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. (8.540.056.581,00)

- (3) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (6.778.785.755,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. (1.761.270.826,00)
b. Realisasi	<u>Rp. (8.540.056.581,00)</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. (6.778.785.755,00)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. (6.778.785.755,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Daerah:	
1. Setelah perubahan	Rp. 32.642.420.241,00
2. Realisasi	<u>Rp. 32.642.420.241,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Daerah:	
1. Setelah perubahan	Rp. 58.072.616.076,00
2. Realisasi	<u>Rp. 64.851.401.831,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. (6.778.785.755,00)

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp. 642.163.888.123,06
b. Jumlah Utang	Rp. 27.749.390.681,53
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 614.414.497.441,53

- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Sisa Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah 2005 huruf a dan b yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Sisa Lebih Perhit. Angg. Tahun Lalu	Rp. 2.842.420.241,00
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 416.179.840.175,00</u>
	Rp. 419.022.260.416,00
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp. 414.846.604.595,00</u>
d. Sisa Perhitungan APBD 2005	<u>Rp. 4.175.655.821,00</u>

Terdiri dari :

1. Sisa Kas 31 Desember 2005	Rp. 100.803.323,000
2. Sisa UUDP Bersih Tahun 2005	Rp. 421.721.799,000
3. Sisa Kas RSUD	Rp. 3.653.130.699,000

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2005 diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I	Rangkaian Laporan Perhitungan APBD;
2. Lampiran II	Laporan Perhitungan APBD;
3. Lampiran III	Laporan Aliran Kas;
4. Lampiran IV	Neraca Daerah;
5. Lampiran V	Laporan Sisa Perhitungan APBD 2005;
6. Lampiran VI	Rekapitulasi Perhitungan APBD Berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi;
7. Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII	Daftar Investasi (Penyertaan Modal);
9. Lampiran IX	Daftar Realisasi Dana Cadangan Daerah;
10. Lampiran X	Daftar Pinjaman Daerah;
11. Lampiran XI	Daftar Cek yang Belum Cair;
12. Lampiran XII	Daftar Aset;
13. Lampiran XIII	Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sebagai Penjabaran lebih lanjut Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2005.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 14 September 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 September 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Bapeda

Ttd.

MEDI PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI A NOMOR 2

**RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
I.	<u>PENDAPATAN</u>			
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	32.833.588.091,00	27.888.427.339,00	84,939
1.1.1.	Pajak Daerah	4.686.952.000,00	4.408.842.734,00	94,066
1.1.2.	Retribusi Daerah	18.049.619.207,00	17.925.993.958,00	99,315
1.1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.107.000.000,00	2.175.419.586,00	103,247
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	7.990.016.884,00	3.378.171.061,00	42,280
1.2.	<u>Dana Perimbangan</u>	329.731.202.910,00	333.112.090.836,00	101,025
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	18.916.288.910,00	20.004.061.240,00	105,750
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	281.270.000.000,00	281.270.000.000,00	100,000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	14.970.000.000,00	14.970.000.000,00	100,000
1.2.4.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	14.574.914.000,00	16.868.029.596,00	115,733
1.3.	<u>Lain-lain Pendapatan yang Sah</u>	25.576.320.000,00	25.379.322.000,00	99,230
	JUMLAH PENDAPATAN	388.141.111.001,00	386.379.840.175,00	99,546
II.	<u>BELANJA</u>			
2.1.	<u>APARATUR DAERAH</u>	82.218.164.560,00	82.439.989.861,00	100,270
2.1.1.	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	64.193.334.880,00	61.438.840.616,00	95,709
2.1.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	57.154.557.690,00	55.008.645.801,00	96,245
2.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.996.227.482,00	2.687.210.720,00	89,686
2.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.074.666.400,00	1.800.638.260,00	86,792
2.1.1.4.	Belanja Pemeliharaan	1.967.883.308,00	1.942.345.835,00	98,702
2.1.2.	<u>Belanja Operasional dan Pemeliharaan</u>	16.737.670.480,00	19.732.172.645,00	117,891
2.1.2.1.	Belanja Pegawai / Personalia	1.508.045.500,00	1.423.666.050,00	94,405
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.450.482.980,00	15.821.083.719,00	127,072
2.1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.729.842.000,00	2.438.125.376,00	89,314
2.1.2.4.	Belanja Pemeliharaan	49.300.000,00	49.297.500,00	99,995
2.1.3.	<u>Belanja Modal</u>	1.287.159.200,00	1.268.976.600,00	98,587
2.2.	<u>PELAYANAN PUBLIK</u>	236.951.809.056,00	233.156.228.786,00	98,398
2.2.1.	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	172.176.772.896,00	172.342.767.403,00	100,096
2.2.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	171.786.168.396,00	171.965.045.417,00	100,104
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.950.000,00	188.706.491,00	97,801
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	102.350.000,00	96.325.000,00	94,113
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	95.304.500,00	92.690.495,00	97,257

2.2.2.	<u>Belanja Operasional dan Pemeliharaan</u>	31.754.059.760,00	29.417.947.411,00	92,643
2.2.2.1.	Belanja Pegawai / Personalia	4.759.679.720,00	4.526.203.092,00	95,095
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.702.114.190,00	20.788.125.351,00	95,788
2.2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.579.632.900,00	1.456.069.000,00	92,178
2.2.2.4.	Belanja Pemeliharaan	3.712.632.950,00	2.647.549.968,00	71,312
2.2.3.	<u>Belanja Modal</u>	33.020.976.400,00	31.395.513.972,00	95,077
2.3.	<u>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</u>	42.193.691.550,00	37.850.698.028,00	89,707
2.4.	<u>Belanja Tidak Tersangka</u>	1.347.250.000,00	723.941.910,00	53,735
	JUMLAH BELANJA SURPLUS (DEFISIT)	362.710.915.166,00	354.170.858.585,00	97,645
		25.430.195.835,00	32.208.981.590,00	126,656
III.	<u>PEMBIAYAAN</u>			
3.1.	<u>Penerimaan Daerah</u>	32.642.420.241,00	32.642.420.241,00	100,000
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	2.842.420.241,00	2.842.420.241,00	100,000
3.1.2.	Transfer dari Dana Cadangan	0,00	0,00	0,000
3.1.3.	Penerimaan Pinjaman dari Obligasi	29.800.000.000,00	29.800.000.000,00	100,000
3.1.4.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,000
3.2.	<u>Pengeluaran Daerah</u>	58.072.616.076,00	64.851.401.831,00	111,673
3.2.1.	Transfer ke Dana Cadangan	0,00	0,00	0,000
3.2.2.	Penyertaan Modal	2.736.000.000,00	2.736.000.000,00	100,000
3.2.3.	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	55.336.616.076,00	57.939.746.010,00	104,704
3.2.4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	0,00	4.175.655.821,00	0,000
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(25.430.195.835,00)	(32.208.981.590,00)	126,656